

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DEMI KETAHANAN BENCANA SATUAN PENDIDIKAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Prastiwi Anggriantini<sup>1</sup>, Ratri Istania<sup>2</sup>, Firman Hadi Rivai<sup>3</sup>

[prastiwianggriantini@gmail.com](mailto:prastiwianggriantini@gmail.com)<sup>1</sup>

Polteknik STIA LAN Jakarta

## ABSTRAK

Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) merupakan inisiatif strategis untuk memperkuat ketahanan satuan pendidikan terhadap bencana alam dan nonalam. Berdasarkan data Kemendikbudristek (2015–2019), lebih dari 12 juta peserta didik dan 62.687 satuan pendidikan terdampak bencana, sehingga diperlukan kebijakan yang menjamin keberlanjutan layanan pendidikan dalam situasi darurat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dan kausal untuk menggali karakteristik fenomena serta hubungan antarvariabel yang memengaruhi efektivitas implementasi SPAB di Provinsi DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung utama meliputi diseminasi pengetahuan kebencanaan melalui simulasi MPLS, integrasi materi kebencanaan dalam pembelajaran, serta partisipasi aktif warga satuan pendidikan dalam pelatihan dan workshop. Di sisi lain, hambatan muncul akibat ketidakpatuhan terhadap surat edaran pembentukan Sekberda SPAB dan perbedaan aspirasi terkait pendekatan pelaksanaan kebijakan. Strategi yang dinilai efektif mencakup penguatan kelembagaan melalui regulasi formal, pengawasan program secara menyeluruh, dukungan anggaran, pemberian apresiasi bagi pelaku aktif PRB, dan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk asesmen sarpras. Temuan ini mempertegas pentingnya sinergi antaraktor dan kebijakan adaptif dalam mendukung ketangguhan sektor pendidikan terhadap bencana.

**Kata Kunci:** Spab, Pengurangan Risiko Bencana, Pendidikan Tangguh Bencana, Kebijakan Pendidikan, Implementasi Program

## ABSTRACT

*The Disaster-Safe Education Unit Program (SPAB) is a strategic initiative to strengthen the resilience of educational units to natural and non-natural disasters. Based on data from the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (2015–2019), more than 12 million students and 62,687 educational units were affected by disasters, necessitating policies that ensure the continuity of educational services in emergency situations. This study used a qualitative approach with a descriptive and causal design to explore the characteristics of the phenomena and the relationships between variables that influence the effectiveness of SPAB implementation in the Special Region of Yogyakarta (DIY). The results indicate that the main supporting factors include the dissemination of disaster knowledge through MPLS simulations, the integration of disaster materials into learning, and the active participation of educational unit residents in training and workshops. On the other hand, obstacles arose due to non-compliance with the circular letter establishing the SPAB Regional Secretariat and differences in aspirations regarding the policy implementation approach. Strategies deemed effective include institutional strengthening through formal regulations, comprehensive program oversight, budget support, appreciation for active DRR actors, and collaboration with universities for infrastructure assessments. These findings emphasize the importance of synergy between actors and adaptive policies in supporting the education sector's resilience to disasters.*

**Keywords:** SPAB, Disaster Risk Reduction, Disaster-Resilient Education, Education Policy, Program Implementation

## PENDAHULUAN

PRB dan ketahanan bencana ialah kesatuan dari pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik (Gencer, 2017). United Nation Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) memaknai ketahanan (resilience) adalah kemampuan suatu sistem, komunitas atau masyarakat yang terpapar bahaya untuk melawan, menyerap, mengakomodasi,

beradaptasi, mengubah dan memulihkan dampak suatu bahaya secara tepat waktu dan efisien, termasuk melalui pelestarian dan pemulihan struktur dasar yang penting dan berfungsi melalui manajemen risiko.

Menurut Jha et.al. (Novita, 2020) terdapat empat komponen yang disinyalir mampu menyokong peningkatan ketahanan bencana, yaitu ketahanan infrastruktur, ketahanan kelembagaan, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Program SPAB berpotensi besar membantu meningkatkan ketahanan bencana karena Kerangka Kerja SPAB memiliki struktur yang terdiri dari:

1. Fondasi: sistem dan kebijakan yang kondusif (ketahanan kelembagaan).
2. Pilar 1: fasilitas belajar yang lebih aman (ketahanan infrastruktur).
3. Pilar 2: manajemen penanggulangan bencana di sekolah dan kesinambungan pendidikan (ketahanan sosial).
4. Pilar 3: pendidikan pengurangan risiko dan resiliensi (ketahanan ekonomi dan sosial).

Lebih lanjut, Parrott, et al. (2024), mengungkapkan bahwa terdapat beberapa definisi ketahanan masyarakat, namun para peneliti umumnya sepakat bahwa ketahanan dimaksud adalah “kapasitas adaptif” yang mendukung masyarakat untuk mengatasi kesulitan (Norris et.al., 2008), (Berkes, 2007), (Gow dan Paton, 2008). Norris et.al. (2008) berteori bahwa keberhasilan adaptasi masyarakat adalah sebuah proses yang muncul dari empat kapasitas adaptif, yaitu pembangunan ekonomi, modal sosial, kompetensi masyarakat, serta informasi dan komunikasi. Sejalan dengan teori Norris et.al. (2008), implementasi Program SPAB berpotensi membentuk ketahanan masyarakat khususnya ketahanan komunitas satuan pendidikan/sekolah, serta merupakan peluang untuk meningkatkan kapasitas adaptif masyarakat melalui peningkatan pembangunan ekonomi, modal sosial, kompetensi masyarakat, serta informasi dan komunikasi.

Dalam penelitian Subarno dan Dewi (2022), disimpulkan bahwa pendidikan merupakan media tercepat untuk meningkatkan kesadaran penanggulangan bencana. Lebih jauh, dinyatakan bahwa kelompok generasi muda lebih membutuhkan pelatihan pendidikan kebencanaan dibandingkan kelompok generasi tua, sehingga sudah sepatutnya pendidikan kebencanaan diberikan kepada generasi muda.

Senada dengan Subarno dan Dewi (2022), Torani et.al (2019) menyatakan bahwa pendidikan kebencanaan efektif pada semua tahap krisis, namun dampaknya lebih besar lagi pada tahap persiapan. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan yang lebih banyak harus dipertimbangkan pada tahap ini (Wisner, 2006), (Muttarak dan Pothisiri, 2013), (Rundmo dan Nordfjærn, 2016).

Penelitian-penelitian terdahulu menguatkan argumen bahwa sektor pendidikan memegang peranan penting dalam upaya PRB dengan mewujudkan ketahanan bencana pada komunitas satuan pendidikan/sekolah, sehingga peneliti beranggapan perlu mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi Program SPAB untuk mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi positif maupun negatif terhadap implementasi Program SPAB di Provinsi DIY. Untuk selanjutnya, dapat dirumuskan rekomendasi strategi implementasi Program SPAB guna meningkatkan ketahanan bencana warga satuan pendidikan..

## **METODE PENELITIAN**

Metode merupakan sekumpulan teknik khusus yang dipakai dalam penelitian sosial, sedangkan metodologi merupakan ilmu tentang metode-metode yang dipakai untuk meneliti, umumnya dipakai guna menunjukkan seperangkat asumsi yang sifatnya konseptual dan filosofis yang membenarkan pemakaian metode tertentu (Martono, 2015). Metode penelitian sosial adalah teknik yang dipakai guna mengidentifikasi hal yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian, cara pengumpulan serta analisis data dan temuan, Payne dan Payne (Martono, 2015).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, namun menggunakan pendekatan deskriptif dan kausal. Hal ini dilakukan karena pendekatan deskriptif memiliki manfaat utama dalam melakukan pemetaan situasi dan karakteristik fenomena, sedangkan pendekatan kausal diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti ilmiah melalui analisis hubungan pengaruh antara variabel-variabel terkait. Peneliti menganggap bahwa fenomena sosial yang diteliti tepat apabila dibidik dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan kausal dalam koridor kualitatif yang memungkinkan peneliti mengumpulkan data berupa interpretasi informan maupun data dari sumber lain dalam bentuk kata-kata maupun kalimat.

Selanjutnya penelitian kualitatif menurut (Martono, 2015), adalah penelitian yang mengupayakan analisis pada kehidupan sosial, caranya dengan menggambarkan dunia sosial melalui interpretasi informan dalam latar ilmiah. Masih menurut (Martono, 2015), penelitian kualitatif adalah upaya untuk menerangkan bagaimana seseorang melihat, menggambarkan, bahkan memaknai dunia sosialnya, yang mana pemaknaannya merupakan buah dari interaksi sosialnya.

Peneliti bermaksud menangkap dampak dari terbitnya sebuah kebijakan, yaitu kebijakan Program SPAB terhadap kelompok sasaran yang ditujunya. Menilik ranah kebijakan SPAB merupakan ranah sosial, maka peneliti berpendapat bahwa penelitian ini tepat apabila menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan penelitian kualitatif yang dapat menganalisis kehidupan sosial.

Bungin (2009) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa teknik pengumpulan data utama meliputi wawancara mendalam, observasi, analisis dokumen, penggunaan bahan visual, dan penelusuran data digital. Meskipun masing-masing teknik dapat diaplikasikan secara independen, namun dalam praktiknya berbagai metode tersebut saling melengkapi dan memperkuat temuan penelitian. Sejalan dengan Bungin, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, serta studi dokumen dan pustaka.

Wawancara dilakukan dengan cara pewawancara mengajukan pertanyaan dan informan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut dengan maksud memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan informan dari instansi sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY (Disdikpora DIY);
2. Pelaksana Harian Sekretariat Bersama SPAB Provinsi DIY (PH Sekber SPAB DIY);
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi DIY (Bapperida DIY);
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DIY (BPBD DIY);
5. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DIY (Kanwil Kemenag DIY);
6. SLB Negeri 1 Bantul (SLBN 1 Bantul);
7. SMA Negeri 2 Yogyakarta (SMAN 2 Yogyakarta); dan
8. Sekretariat Nasional SPAB (Seknas SPAB)

Selanjutnya, observasi dilakukan untuk memahami interaksi dan aktivitas dalam kegiatan PRB di satuan pendidikan. Studi dokumen yang dilakukan meliputi analisis dokumen dan catatan yang relevan dengan program SPAB, seperti dokumen Peta Jalan SPAB Tahun 2019-2024, laporan Seknas SPAB, laporan Sekberda, dan dokumen-dokumen lain yang terkait..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara berdasarkan klasifikasi pertanyaan kepada informan dikaitkan dengan dimensi teori implementasi kebijakan Grindle yang meliputi dimensi *content of policy* (isi kebijakan) dengan subdimensi 1) *Interest affected* (kepentingan yang memengaruhi); 2) *Type of benefits* (jenis manfaat yang diperoleh); 3) *Extend of change envisioned* (derajat perubahan yang ingin dicapai), 4) *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan); 5)

*Program implementator* (pelaksana program); dan 6) *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan); dan dimensi *Context of implementation* (konteks Implementasi) dengan subdimensi 1) *Power, interests, and strategies of actors involved* (kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat); 2) *Institution and Regime Characteristics* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa); dan 3) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana), diperoleh hasil sebagai berikut:

### 1. Dimensi *Content of Policy* (Isi Kebijakan)

#### a. Subdimensi *Interest Affected* (kepentingan yang memengaruhi)

Pada dimensi kepentingan yang memengaruhi dengan subklasifikasi pertanyaan bagaimana pembentukan Sekretariat Bersama SPAB Daerah DIY, payung hukum dan peraturan turunannya? Informan 1, 2, 3, 4, dan 5 senada menyampaikan bahwa,

Telah ada payung hukum terkait pembentukan Sekretariat Bersama SPAB Daerah DIY, yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan, dengan salah satu peraturan turunannya adalah Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72/Kep/2023 tentang Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah Periode 2023-2026.

#### b. Subdimensi *Type of Benefits* (Jenis manfaat yang diperoleh)

Informan 1 menyampaikan bahwa jenis manfaat yang diperoleh dari implementasi Program SPAB sebagaimana subdimensi manfaat implementasi kebijakan adalah akselerasi koordinasi antar komponen pemangku kepentingan. Informan 1, 3, dan 5 sependapat bahwa pada subdimensi dukungan terhadap implementasi kebijakan, telah termanifestasikan melalui peluncuran aplikasi “*Jogja Digdaya*”.

Aplikasi “*Jogja Digdaya*” merupakan manifestasi dari akselerasi koordinasi antar komponen pemangku kepentingan. “*Jogja Digdaya*” berfungsi menjadi *platform* bersama yang berguna sebagai ruang pelaporan suatu kejadian di lingkup satuan pendidikan. Diharapkan melalui *platform* bersama ini, maka terwujud penanganan yang lebih cepat dan maksimal, serta ketepatan sasaran penyaluran bantuan di satuan/lembaga pendidikan/sekolah pada saat terjadi bencana sebagaimana disampaikan oleh informan 5. Selain itu, “*Jogja Digdaya*” juga diharapkan berfungsi menjadi basis data yang berguna sebagai *evidence* dan landasan pengambilan keputusan para pemangku kepentingan terkait.

Selain aplikasi “*Jogja Digdaya*”, pada subdimensi jenis manfaat yang diperoleh, informan 1 dan 6 menyampaikan bahwa melalui dukungan dari Yayasan Plan Internasional Indonesia, maka dapat dihasilkan modul-modul atau materi pembelajaran mengenai kebencanaan.

#### c. Subdimensi *Extend of Change Envisioned* (Derajat perubahan yang ingin dicapai)

Subdimensi derajat perubahan yang ingin dicapai mengandung indikator berupa tujuan implementasi kebijakan dan bentuk perubahan yang diharapkan dari pengimplementasian kebijakan.

- 1) Pada subklasifikasi pertanyaan “Apakah sudah tersusun peta jalan dan program kerja Sekretariat Bersama SPAB Daerah DIY dengan melibatkan *stakeholder* terkait dan apa kontribusi instansi Bapak/Ibu dalam penyusunan peta jalan dan program kerja tersebut?”, informan 3 menyatakan bahwa

Sudah tersusun peta jalan dan program kerja Sekretariat Bersama SPAB Daerah DIY. Bapperida DIY berperan tidak hanya mendorong pencantuman tujuan akhir, seperti peningkatan jumlah satuan pendidikan yang memenuhi standar SPAB, namun juga mendorong perincian aktivitas-aktivitas yang secara konkret berkontribusi terhadap pencapaian target Program SPAB. Setiap aktivitas wajib disertai dengan indikator ukur. Hal ini penting agar implementasi program tidak berhenti pada tahap pelaksanaan, tetapi juga

dapat dimonitor, dievaluasi, dan dilaporkan secara akuntabel. Pemahaman terhadap makna peta jalan perlu ditanamkan bersama agar semua pelaku dapat secara konsisten menilai progres dan memaksimalkan nilai dari program yang dijalankan.

Selain itu, informan 4 menyampaikan bahwa

Sudah tersusun peta jalan dan program kerja Sekretariat Bersama SPAB Daerah DIY. Kontribusi BPBD DIY adalah dengan mengakomodasikan sesi penyampaian peta jalan dan program kerja Sekber SPAB pada pelaksanaan monev SPAB.

Terkait subdimensi derajat perubahan yang ingin dicapai, informan 3 dan 4 senada menyampaikan bahwa sudah ada bentuk perubahan yang diharapkan dari pengimplementasian kebijakan, yaitu dengan tersusunnya peta jalan dan program kerja Sekretariat Bersama SPAB Daerah DIY. Lebih lanjut, informan 3 menyampaikan elemen krusial dari tersusunnya peta jalan dan program kerja SPAB Daerah DIY, yaitu perincian aktivitas-aktivitas yang secara nyata berkontribusi terhadap pencapaian target Program SPAB dan setiap aktivitas wajib disertai dengan indikator ukur. Perincian aktivitas yang disertai dengan indikator ukur krusial untuk dilakukan supaya Program SPAB tidak hanya dapat terlaksana, namun juga dapat dilakukan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan secara akuntabel. Hal ini senada dengan informan 4 yang menyampaikan juga bahwa instansinya turut berkontribusi dalam *monitoring* dan evaluasi Program SPAB dengan mengakomodasikan sesi penyampaian peta jalan dan program kerja Sekber SPAB DIY.

2) Pada subklasifikasi pertanyaan “Apakah sudah terbentuk *pool of trainer* SPAB untuk mendukung pelaksanaan SPAB?”, informan 1, 3, dan 5 menyatakan bahwa sudah terbentuk *pool of trainer* SPAB. Lebih lanjut, informan 1 menyampaikan bahwa instansinya telah mencetak 305 trainer/fasilitator Program SPAB semenjak tahun 2022 hingga kini.

3) Terkait pelaksanaan pelatihan/simulasi kebencanaan, informan 6 memberi penjelasan bahwa terdapat derajat perubahan berupa ketenangan siswa dalam merespon kegiatan simulasi penanganan bencana pada satuan pendidikan.

d. Subdimensi *Site of Decision Making* (Letak pengambilan keputusan)

Pada subdimensi letak pengambilan keputusan terdapat indikator berupa aktor pengambil dan penentu keputusan dalam suatu kebijakan, serta keterlibatan *stakeholders* terhadap pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan. Sehubungan dengan implementasi kebijakan Program SPAB, aktor pengambil keputusan terdiri dari dinas-dinas di lingkup Provinsi DIY yang membidangi sektor perencanaan, pendidikan, dan penanggulangan bencana. Dinas yang menaungi bidang perencanaan menjadi aktor strategis pengambil keputusan terkait implementasi Program SPAB, begitu pula dengan dinas yang menaungi bidang pendidikan dan penanggulangan bencana daerah.

Informan 3 mengungkapkan bahwa, Bapperida DIY berperan strategis dalam Program SPAB di tingkat provinsi karena sebagai lembaga perencanaan, semua kebijakan dan program harus bermula dari perencanaan yang sah agar dapat diimplementasikan dan didanai.

Lebih lanjut, Informan 1 mengungkapkan pandangannya sebagai berikut:

Gagasan untuk memasukkan SPAB ke dalam instrumen akreditasi sekolah secara eksplisit memang bertujuan baik, namun pada kenyataannya substansi dari SPAB sudah terkandung dalam berbagai aspek penilaian akreditasi saat ini. Penekanan pada penguatan implementasi program SPAB di lapangan menjadi lebih penting dibandingkan sekadar memasukkan terminologinya ke dalam dokumen akreditasi. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih bijak adalah dengan memperkuat pemahaman bahwa pelaksanaan SPAB akan secara otomatis mendukung tercapainya standar akreditasi, khususnya dalam hal menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung karakter peserta didik.

Informan 5 menyampaikan bahwa salah satu strategi yang dapat mendorong optimalisasi PRB di lingkup satuan pendidikan adalah melalui dukungan regulasi berupa dimasukkannya

Program SPAB menjadi salah satu indikator penilaian akreditasi lembaga pendidikan/madrasah. Informan 5 berpendapat, bahwa:

Dengan masuknya Program SPAB secara eksplisit menjadi salah satu indikator penilaian akreditasi lembaga pendidikan/madrasah menjadi titik tekan bagi lembaga pendidikan/madrasah untuk melengkapi lembaganya dengan menerapkan Program SPAB. Hal ini dilakukan oleh lembaga Pendidikan/madrasah agar mendapat penilaian akreditasi yang baik. Selain itu, titik tekan lain adalah dicabutnya izin operasional lembaga pendidikan/madrasah apabila tidak mencapai nilai akreditasi yang baik. Selain masuknya Program SPAB secara eksplisit menjadi salah satu indikator penilaian akreditasi lembaga pendidikan/madrasah, strategi lain untuk mendorong optimalisasi PRB di lingkup lembaga pendidikan/madrasah adalah dengan memasukkan materi pembelajaran PRB ke dalam kurikulum nasional.

e. Subdimensi *Program Implementator* (Pelaksana program)

Subdimensi pelaksana program memiliki indikator berupa adanya pihak-pihak yang mengimplementasikan kebijakan, karakteristik yang menjadi tolak ukur dalam penentuan pihak pelaksana kebijakan, dan kerja sama antar pihak-pihak yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Dari indikator-indikator tersebut, dapat ditentukan pihak-pihak yang mengimplementasikan kebijakan yaitu dinas yang membidangi pendidikan beserta jajaran yang dinaunginya, antara lain satuan/lembaga pendidikan/sekolah, badan yang menaungi bidang perencanaan pembangunan daerah, badan yang menaungi penanggulangan bencana daerah, dan NGO.

Dinas yang membidangi pendidikan melaksanakan fungsi pelaksana teknis dan badan yang menaungi penanggulangan bencana daerah melaksanakan fungsi koordinasi, sebagaimana dijelaskan oleh informan 3:

BPBD berperan sebagai koordinator dan advisor, bukan pelaksana teknis dalam program SPAB. Sebagaimana badan-badan pemerintah lainnya yang berbentuk "badan", fungsi utama BPBD adalah koordinasi lintas sektor, bukan menjalankan kegiatan teknis secara langsung. Tugas teknis tetap menjadi ranah dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan untuk isu pendidikan atau Dinas Sosial untuk isu sosial. Dalam konteks SPAB, BPBD melakukan supervisi dan asistensi terkait kebencanaan, sementara manajemen operasionalnya berada di bawah Dinas Pendidikan. Untuk efektivitas kelembagaan, struktur SPAB diatur secara kolektif melalui unsur pengarah dan pelaksana, di mana Wakil Kepala Dinas Pendidikan ditunjuk sebagai ketua pelaksana guna menyeimbangkan beban kerja yang tinggi pada pimpinan utama dinas.

Lebih lanjut, informan 3 menjelaskan fungsi badan menaungi bidang perencanaan pembangunan daerah, yaitu sebagai berikut:

Bappeda berperan strategis dalam program SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) di tingkat provinsi karena sebagai lembaga perencana, semua kebijakan dan program harus bermula dari perencanaan yang sah agar dapat diimplementasikan dan didanai. Keterlibatan Bappeda dalam SPAB sudah dimulai sejak awal munculnya gagasan pada tahun 2012, yang awalnya bernama Sekolah Aman Bencana, lalu berkembang menjadi ESMAP, dan kemudian menjadi SPAB. SPAB sendiri berada dalam rumpun kebencanaan, sehingga pengampunya di tingkat pusat adalah BPBD/BNPB, bukan Kementerian Pendidikan. Pada periode 2012–2017, SPAB bahkan dijadikan indikator kinerja Bappeda karena sesuai dengan pendekatan Pengurangan Risiko Bencana berbasis komunitas (*Community-Based Disaster Risk Reduction*), dengan komunitas sekolah sebagai fokus utamanya.

Informan 1 menambahkan mengenai fungsi NGO yang terlibat dalam implementasi kebijakan Program SPAB yaitu sebagai pemberi dukungan dalam bentuk komitmen, sumber daya baik pendanaan maupun manusia, dan inovasi.

f. Subdimensi *Resources Committed* (Sumber-sumber daya yang digunakan)

Terkait subdimensi sumber-sumber daya yang digunakan, terdapat indikator sebagai

berikut:

- 1) Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengimplementasikan kebijakan  
 Kualitas SDM dalam mengimplementasikan kebijakan diwujudkan antara lain melalui kegiatan pelatihan, bimtek, maupun *workshop* mengenai Program SPAB sehingga dihasilkan fasilitator Program SPAB sebagai ujung tombak implementasi kebijakan Program SPAB.  
 Kuantitas SDM dalam implementasi Program SPAB diupayakan pula pemenuhannya melalui pelatihan, bimtek, maupun *workshop* fasilitator SPAB dengan melibatkan multi pihak dan lintas sektor, seperti pelibatan NGO, perguruan tinggi, komunitas pemuda, dan sebagainya.
- 2) Kualitas dan kuantitas sumber daya finansial atau pendanaan dalam mengimplementasikan kebijakan.  
 Sumber dana finansial atau pendanaan Program SPAB dapat diperoleh melalui BOSDA maupun BOSNAS dan APBD.
- 3) Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana (sarpras) dalam mengimplementasikan kebijakan.  
 Kuantitas dan kualitas sarpras diupayakan eskalasinya melalui pelaksanaan tugas dan fungsi wakil kepala sekolah bidang sarpras dan Dinas Pekerjaan Umum yang berperan sebagai pendamping satuan/lembaga pendidikan/sekolah dalam melakukan asesmen kelayakan sarpras

## **2. Dimensi *Context of implementation* (Konteks Implementasi)**

- a. Subdimensi *Power, Interests, and Strategies of Actors Involved* (Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat)

Pada subdimensi kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat, terdapat indikator sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan aktor yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan  
 Aktor-aktor kunci yang terlibat dalam implementasi kebijakan Program SPAB di Provinsi DIY adalah dinas, badan, lembaga, dan perseorangan yang memiliki komitmen tinggi terhadap implementasi Program SPAB sekaligus keberlanjutannya. Aktor-aktor kunci tersebut antara lain adalah dinas yang membidangi pendidikan beserta jajaran yang dinaunginya, seperti satuan/lembaga pendidikan/sekolah, badan yang menaungi bidang perencanaan pembangunan daerah, badan yang menaungi penanggulangan bencana daerah, dan NGO.
- 2) Kepentingan aktor yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan.
  - a) Dinas yang membidangi pendidikan beserta jajaran yang dinaunginya  
 Dinas yang membidangi pendidikan di Provinsi DIY merupakan instansi vertikal dari dinas pusat yang membidangi pendidikan dasar dan menengah, sehingga mendapat *mandatory* langsung untuk mengimplementasikan kebijakan Program SPAB di lingkup kewenangannya, yaitu lingkup Provinsi DIY.
  - b) Badan yang menaungi bidang perencanaan pembangunan daerah  
 Badan ini menjadi aktor kunci pula sehubungan dengan fungsi perencanaan yang melekat pada tugas dan fungsi badan tersebut. Program SPAB mutlak memerlukan persetujuan dan pengawalan dari badan yang menaungi bidang perencanaan pembangunan daerah di Provinsi DIY. Hal ini guna memastikan pengimplementasian Program SPAB mendapat dukungan perencanaan dan penganggaran, sehingga selain kebijakan Program SPAB dapat terimplementasikan, keberlanjutannya pun dapat terjamin.
  - c) Badan yang menaungi penanggulangan bencana daerah  
 Badan yang menaungi penanggulangan bencana daerah menjadi aktor kunci

pengimplementasian Program SPAB karena badan ini adalah *leading sector* bidang penanggulangan bencana.

d) NGO

NGO berperan sebagai mitra pemerintah dalam implementasi Program SPAB dengan memberi dukungan komitmen, pendanaan, SDM, dan inovasi.

3) Strategi aktor yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan.

Setiap aktor memiliki strategi masing-masing guna memastikan implementasi dan keberlanjutan kebijakan Program SPAB.

a) Dinas yang membidangi pendidikan beserta jajaran yang dinaunginya

Dinas yang membidangi pendidikan di Provinsi DIY menekankan strategi berupa pelekatan indikator utama SPAB ke dalam fungsi satuan/lembaga pendidikan/sekolah. Sebagaimana disampaikan oleh informan 1,

Penilaian kinerja Kepala Sekolah (PKKS) memberi dorongan kepada kepala sekolah untuk menerapkan SPAB. Agar mendapatkan penilaian yang baik yang tentu mempengaruhi jenjang karir kepala sekolah, maka kepala sekolah sebagai personal sudah barang tentu mengusahakan pengimplementasian SPAB pada sekolah yang dipimpinnya karena ada konsekuensi dari penilaian kinerja tersebut. Apabila penilaian kinerja baik berpengaruh terhadap peningkatan jenjang karir kepala sekolah. Namun, bila hasil penilaian kinerja buruk, maka ada konsekuensi pemberhentian menjadi kepala sekolah atau pemindahan.

Strategi lain adalah dengan memberikan penghargaan kepada tokoh yang aktif dalam upaya PRB.

b) Badan yang menaungi bidang perencanaan pembangunan daerah

Strategi yang didorong oleh badan yang menaungi bidang perencanaan pembangunan daerah di Provinsi DIY guna memastikan implementasi kebijakan dan keberlanjutan Program SPAB adalah dengan melakukan penguatan dan peningkatan jumlah fasilitator. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan 3, yaitu

Jumlah fasilitator manajemen bencana di satuan pendidikan masih terbatas, sehingga perlu dilakukan penguatan dan perluasan jumlah agen fasilitator. Fasilitator ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan untuk mendukung program atau merespons permintaan dari sekolah terkait kegiatan SPAB. Untuk memperluas jangkauan, guru-guru—terutama yang membidangi kesiswaan atau berperan sebagai guru Bimbingan dan Konseling (BK)—menjadi target utama pelatihan fasilitator. Alasannya, mereka memiliki kedekatan dan akses langsung ke siswa yang merupakan kelompok sasaran utama dalam pendidikan kebencanaan. Selain itu, guru BK umumnya memiliki beban kerja yang lebih fleksibel dibandingkan guru mata pelajaran, sehingga lebih memungkinkan untuk terlibat aktif dalam kegiatan fasilitasi manajemen bencana di sekolah.

c) Badan yang menaungi bidang penanggulangan bencana daerah

Strategi yang dilakukan oleh badan yang menaungi bidang penanggulangan bencana daerah di Provinsi DIY dalam mengimplementasikan Program SPAB adalah dengan memberi dukungan anggaran, sebagaimana disampaikan oleh informan 4, BPBD DIY mengalokasikan anggaran yang relevan dan memadai guna mendukung penyelenggaraan program SPAB pada satuan pendidikan. Lebih lanjut, informan 4 menyampaikan pula pengalokasian anggaran tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan pembentukan SPAB, *monitoring* dan evaluasi SPAB, serta penyediaan sarana dan prasarana SPAB.

d) NGO

Strategi NGO adalah dengan mengambil peran sebagai mitra pemerintah yang memberi dukungan komitmen, pendanaan, SDM, dan inovasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan



dar informan 1, yaitu pelatihan dilakukan pula oleh lembaga-lembaga NGO, seperti Plan Internasional Indonesia, MDMC, KIPA. Yang paling kuat dalam segi pendanaan dan sumber daya, komitmen, dan inovasi adalah Plan Internasional Indonesia.

b. Subdimensi *Institution and Regime Characteristics* (Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa)

Subdimensi karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa mengandung indikator sebagai berikut:

1) Pengaruh kewenangan aktor dalam lembaga terhadap keberhasilan implementasi kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan Program SPAB selain dipengaruhi oleh kewenangan aktor-aktor dalam lembaga yang terlibat adalah dipengaruhi pula oleh komitmen aktor-aktor tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan 1, 2, 3, 4, dan 5. Para informan tersebut sependapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Program SPAB didukung oleh komitmen pimpinan, baik pimpinan daerah, dinas, badan, maupun lembaga yang berkaitan.

2) Pengaruh karakteristik lingkungan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik).

Di Provinsi DIY karakteristik lingkungan seperti kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Program SPAB. Hal ini sejalan dengan hal yang disampaikan oleh informan 1 dan 2. Mereka senada menyampaikan bahwa masyarakat Provinsi DIY memiliki kesadaran kolektif yang sama, yaitu mereka tinggal di kawasan rawan bencana dan mengalami bencana berulang kali, kemudian kesadaran bahwa bencana datang tiba-tiba dan anak-anak merupakan bagian terbesar di satuan pendidikan yang harus dilindungi.

c. Subdimensi *Compliance and Responsiveness* (Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Pada subdimensi tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana, terkandung indikator-indikator berikut:

1) Kepatuhan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan

Pelaksana pada implementasi kebijakan Program SPAB antara satuan/lembaga pendidikan/sekolah. Di lingkup satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangan Provinsi DIY, yaitu satuan pendidikan pada jenjang SMA, SMK, dan SLB, para pelaksana ini cukup patuh dalam mengimplementasikan kebijakan Program SPAB. Kepatuhan itu tergambar sebagaimana disampaikan oleh informan 6 dan 7, yaitu satuan pendidikan telah melakukan simulasi kebencanaan pada masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS), mengintegrasikan edukasi kebencanaan ke dalam materi pembelajaran, melakukan penilaian mandiri kelayakan sarpras, dan mengikuti pelatihan, bimtek, dan *workshop* kebencanaan.

Selain satuan/lembaga pendidikan/sekolah, pelaksana lainnya adalah pimpinan kabupaten/kota di Provinsi DIY. Salah satu indikator implementasi SPAB di Provinsi DIY adalah terbentuknya sekretariat bersama (sekber) kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan pembentukannya dalam Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019. Namun demikian, menurut informan 1, 2, 3, dan 4, baru dua kabupaten yang telah membentuk sekber, yaitu Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul. Selebihnya yaitu Kabupaten Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta masih berproses dalam pembentukan sekber kabupaten/kota.

2) Faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan

Faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan adalah kesadaran kolektif bahwa satuan pendidikan harus mampu menjadi tempat aman bagi warganya, utamanya anak-anak.

- 3) Bentuk respon pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan  
Bentuk respon pelaksana cukup variatif. Dalam kaitannya dengan pembentukan sekber kabupaten/kota, baru dua kabupaten yang telah membentuk sekber. Selebihnya tengah berproses.

#### **A. Analisis Data dan Pembahasan**

Dimensi dari isi kebijakan dan konteks implementasi digunakan oleh peneliti untuk menganalisis hasil penelitian yang melibatkan delapan informan dari institusi yang memiliki kaitan dengan implementasi kebijakan Program SPAB di Provinsi DIY. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah disajikan, telah diperoleh berbagai macam informasi, untuk menjawab permasalahan yang tertera pada Bab 1 yaitu:

1. Apa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap implementasi Program SPAB?
2. Bagaimana strategi implementasi Program SPAB selanjutnya?

Dari sudut pandang teori implementasi kebijakan Grindle yang ditinjau dari dimensi isi kebijakan dan konteks implementasi, dapat dianalisis dengan metode kualitatif sebagai berikut:

##### **1. Dimensi Isi Kebijakan**

- a. Subdimensi *Interest Affected* (kepentingan yang memengaruhi)

Pada subdimensi kepentingan yang memengaruhi dengan klasifikasi pertanyaan meningkatkan kemampuan sumberdaya di satuan pendidikan dalam menanggulangi dan mengurangi risiko bencana, subklasifikasi mengenai pembentukan Sekretariat Bersama SPAB Daerah DIY, payung hukum dan peraturan turunannya, informan 1, 2, 3, dan 4 senada menyampaikan bahwa,

Telah ada payung hukum terkait pembentukan Sekretariat Bersama SPAB Daerah DIY, yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan, dengan salah satu peraturan turunannya adalah Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72/Kep/2023 tentang Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah Periode 2023-2026.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sudah ada payung hukum untuk sebagai faktor yang berkontribusi positif terhadap implementasi Program SPAB. Selanjutnya, terkait indikator-indikator pada subdimensi kepentingan yang memengaruhi, yaitu kesesuaian kebijakan dengan permasalahan yang terjadi pada kelompok sasaran, kebijakan dipengaruhi oleh berbagai pihak yang kepentingannya terpengaruhi, dan pemahaman kelompok sasaran terkait isi kebijakan, dapat diketahui sebagai berikut:

- 1) Terdapat kesesuaian kebijakan dengan permasalahan yang terjadi pada kelompok sasaran. Permasalahan pada kelompok sasaran, yaitu satuan pendidikan adalah masih rendahnya jumlah satuan pendidikan yang menerapkan Program SPAB. Dari 8.268 unit satuan Pendidikan di Provinsi DIY, baru 886 unit satuan pendidikan yang melaporkan capaian pelaksanaan Program SPAB. Hal ini mengindikasikan bahwa baru 11% satuan pendidikan yang melaksanakan Program SPAB. Dengan demikian, hadirnya payung hukum beserta peraturan turunannya yang mengatur mengenai SPAB diharapkan dapat mendorong optimalisasi dan percepatan implementasi Program SPAB.
- 2) Lahirnya kebijakan Program SPAB berangkat dari kesadaran kolektif akan persamaan pandangan bahwa masyarakat Provinsi DIY tinggal di kawasan rawan bencana, pernah mengalami bencana berulang kali, dan kesadaran bahwa bencana datang tiba-tiba. Selain hal tersebut, informan 1 dan 5 sependapat bahwa anak-anak merupakan jumlah terbanyak dalam sebuah satuan/lembaga pendidikan/sekolah, sehingga pemerintah wajib hadir dengan menghasilkan mengimplementasikan kebijakan yang melindungi anak-anak dan seluruh warga satuan/lembaga pendidikan/sekolah.
- 3) Melalui paradigma baru mengenai implementasi Program SPAB, yaitu dengan

melekatkan indikator-indikator utama Program SPAB terhadap fungsi-fungsi satuan/lembaga pendidikan/sekolah tanpa membentuk kelembagaan baru, maka kelompok sasaran yaitu satuan/lembaga pendidikan/sekolah dapat menerima dan mengusahakan keberlanjutan Program SPAB.

b. Subdimensi *Type of Benefits* (Jenis manfaat yang diperoleh)

Sudah ada aplikasi JOGJA DIGDAYA, namun masih perlu sosialisasi agar aplikasi tersebut berdaya guna secara optimal.

- 1) Manfaat implementasi kebijakan.
- 2) Dukungan terhadap implementasi kebijakan.

c. Subdimensi *Extend of Change Envisioned* (Derajat perubahan yang ingin dicapai)

Kesimpulannya adalah bahwa dalam penyusunan peta jalan dan program kerja SPAB Daerah DIY elemen yang krusial harus termaktub selain aktivitas yang secara nyata berkontribusi terhadap pencapaian target Program SPAB Daerah DIY, target itu sendiri harus pula memiliki indikator ukur yang jelas agar aktivitas yang dilakukan dapat terukur supaya dapat dilakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang akuntabel oleh instansi dan lembaga terkait.

Namun demikian jumlah sebanyak 305 fasilitator masih jauh dari jumlah ideal fasilitator SPAB di Provinsi DIY yang memiliki 8.268 satuan pendidikan

- 1) Tujuan implementasi kebijakan.
- 2) Bentuk perubahan yang diharapkan dari pengimplementasian kebijakan.

d. Subdimensi *Site of Decision Making* (Letak pengambilan keputusan)

- 1) Aktor pengambil dan penentu Keputusan dalam suatu kebijakan.
- 2) Keterlibatan stakeholders terhadap pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan.

e. Subdimensi *Program Implementator* (Pelaksana program)

Terdapat perbedaan pendapat antara informan 1 dan informan 5 sebagai pelaksana Program pada implementasi Program SPAB. Perbedaan pendapat tersebut adalah mengenai urgensi dimasukkannya Program SPAB secara eksplisit menjadi salah satu indikator penilaian akreditasi satuan pendidikan.

Informan 1 berpendapat bahwa implementasi Program SPAB telah terkandung dalam berbagai aspek penilaian, meskipun tidak secara eksplisit menjadi indikator dalam penilaian akreditasi satuan pendidikan. Namun demikian, substansi SPAB pada Pilar 1 (P1), yaitu fasilitas belajar yang lebih aman telah terkandung dalam salah satu indikator penilaian Rapor Pendidikan Indonesia (RPI), yaitu iklim keamanan sekolah.

RPI berisi hasil evaluasi sistem pendidikan, meliputi hasil belajar murid, proses pembelajaran, pemerataan kualitas layanan, kualitas pengelolaan sekolah, serta kualitas sumber daya manusia yang terlibat di sekolah. RPI berguna bagi sekolah dan pemerintah daerah sebagai pedoman strategi perencanaan peningkatan kualitas layanan. Pemenuhan terhadap salah satu indikator RPI, yaitu iklim keamanan sekolah, termasuk

adalah Kondisi lingkungan tempat belajar yang memberikan keamanan (secara fisik dan psikologis), serta keselamatan bagi anak, guru, dan tenaga kependidikan satuan pendidikan, yaitu .

Yang berwenang memasukkan materi PRB ke dalam kurikulum adalah Kemendikdasmen

P1 menekankan prinsip area satuan pendidikan yang relatif aman dari risiko bencana, diterapkannya pembangunan menggunakan desain dan konstruksi yang aman terhadap bencana, serta pengkajian ulang terhadap satuan pendidikan yang lama guna menetapkan prioritas penguatan struktur dan penggantian. termanifestasi dalam Gagasan untuk memasukkan SPAB ke dalam instrumen akreditasi sekolah secara eksplisit memang bertujuan baik, namun pada kenyataannya substansi dari SPAB sudah terkandung dalam berbagai aspek penilaian akreditasi saat ini. Penekanan pada penguatan implementasi program SPAB di

lapangan menjadi lebih penting dibandingkan sekadar memasukkan terminologinya ke dalam dokumen akreditasi. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih bijak adalah dengan memperkuat pemahaman bahwa pelaksanaan SPAB akan secara otomatis mendukung tercapainya standar akreditasi, khususnya dalam hal menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung karakter peserta didik.

- 1) Pihak-pihak yang mengimplementasikan kebijakan.
  - 2) Karakteristik yang menjadi tolak ukur dalam menentukan pihak pelaksana kebijakan.
  - 3) Kerja sama antar pihak-pihak yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan.
- f. Subdimensi *Resources Committed* (Sumber-sumber daya yang digunakan)

. Pendampingan ini diperlukan sebagai

- 1) Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan.
- 2) Kualitas dan kuantitas sumber daya finansial atau pendanaan dalam mengimplementasikan kebijakan.
- 3) Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam mengimplementasikan kebijakan.

## 2. Dimensi Konteks Implementasi

- a. Subdimensi *Power, Interests, and Strategies of Actors Involved* (Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat)
  - 1) Kekuasaan aktor yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan.
  - 2) Kepentingan aktor yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan.
  - 3) Strategi aktor yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan.
- b. Subdimensi *Institution and Regime Characteristics* (Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa)
  - 1) Pengaruh kewenangan aktor dalam Lembaga terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.
  - 2) Pengaruh karakteristik lingkungan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik).
- c. Subdimensi *Compliance and Responsiveness* (Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)
  - 1) Kepatuhan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan.
  - 2) Faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan.
  - 3) Bentuk respon pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan.

## KESIMPULAN

Faktor yang berkontribusi positif terhadap implementasi Program SPAB berdasarkan indikator-indikator kunci SPAB, yaitu Fondasi, Pilar 1, Pilar 2, dan Pilar 3 adalah sebagai berikut:

### 1. Fondasi: Sistem dan Kebijakan yang Kondusif

Berkenaan dengan kebijakan yang kondusif, implementasi Program SPAB di Provinsi DIY telah berpayung hukum. Payung hukum yang menaunginya antara lain:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana
- b. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Aman Bencana Pada Satuan Pendidikan
- c. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72/KEP/2023 tentang Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah Periode 2023-2026
- d. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72/KEP/2023 tentang Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah Periode 2023-2026

- e. Surat Edaran Nomor 5/SE/III/2023 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah Kabupaten/Kota
- f. Peta Jalan SPAB DIY 2023-2026

Terkait sistem yang berkontribusi positif terhadap implementasi Program SPAB adalah diterapkannya pendekatan/paradigma baru yang berorientasi pada pelekatan indikator-indikator utama SPAB kepada pelaksanaan fungsi-fungsi satuan pendidikan bukan berorientasi proyek pendampingan belaka. Pelekatan indikator utama SPAB pada fungsi satuan pendidikan memberi jaminan akan dukungan SDM dan anggaran, sehingga implementasi Program SPAB dapat terjamin keberlanjutannya.

## 2. Pilar 1: Fasilitas Belajar yang Lebih Aman

Faktor yang berkontribusi positif terhadap pemenuhan fasilitas belajar yang lebih aman, yaitu kemandirian satuan pendidikan/sekolah dalam melakukan kajian kelayakan fungsi sarpras.

## 3. Pilar 2: Manajemen Penanggulangan Bencana di Sekolah

Faktor yang berkontribusi positif terhadap manajemen penanggulangan bencana di sekolah antara lain adalah tersedianya trainer/fasilitator SPAB di setiap satuan pendidikan/sekolah yang dapat menjadi motor penggerak tim siaga bencana di satuan pendidikan/sekolah.

## 4. Pilar 3: Pendidikan Pengurangan Risiko dan Resiliensi

Faktor yang berkontribusi positif terhadap pendidikan pengurangan risiko dan resiliensi antara lain diseminasi pengetahuan kebencanaan melalui kegiatan simulasi kebencanaan pada saat MPLS, pengintegrasian edukasi kebencanaan ke dalam materi pembelajaran dan pertemuan-pertemuan khusus seperti kegiatan ekstrakurikuler dan partisipasi warga satuan pendidikan dalam kegiatan pelatihan, bimtek, dan workshop kebencanaan.

Selain faktor yang berkontribusi positif, terdapat pula faktor yang berkontribusi negatif terhadap implementasi kebijakan Program SPAB, antara lain adanya ketidakpatuhan terhadap arahan dari surat edaran pimpinan mengenai pembentukan sekberda SPAB kabupaten/kota yang mengakibatkan belum terbentuknya sekberda pada dua kabupaten dan satu kota di Provinsi DIY.

Faktor yang memberi kontribusi negatif lainnya adalah munculnya aspirasi yang berbeda mengenai pendekatan dalam pelaksanaan kebijakan SPAB. Terdapat pihak yang berpandangan bahwa implementasi kebijakan Program SPAB perlu dioptimalkan dengan mendorong dimasukkannya Program SPAB ke dalam kurikulum nasional dan dijadikan salah satu indikator penilaian akreditasi satuan pendidikan. Namun ada pihak lain yang berpandangan bahwa implementasi kebijakan Program SPAB cukup dengan melekatkan indikator-indikator utama SPAB pada fungsi-fungsi yang sudah ada di satuan pendidikan, seperti pada fungsi waka sarpras, kurikulum, dan kesiswaan.

Strategi yang berkontribusi positif terhadap implementasi kebijakan Program SPAB antara lain adalah:

1. Pengutamaan kelembagaan yang awalnya bentuk kelembagannya secara ad hoc kemudian diformalkan melalui keputusan gubernur, sehingga diperoleh perikatan yang lebih kuat dan luas serta memungkinkan pelibatan aktor-aktor nonpemerintah, seperti perguruan tinggi, NGO, dan mitra pembangunan.
2. Pengawasan Program SPAB sedari proses perencanaan, implementasi hingga monitoring dan evaluasi.
3. Pemberian dukungan anggaran yang relevan dan memadai dari para pemangku kepentingan Program SPAB.
4. Pemberian penghargaan kepada tokoh yang berkontribusi aktif dalam kegiatan PRB.
5. Penjajakan kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki prodi teknik sipil untuk dapat membantu asesmen kelayakan sarpras pada satuan pendidikan..

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, E. A., & Sano, H.-O. (2006). Human Rights Indicator at Programme and Project Level-Guidelines for Defining Indicator, Monitoring, and Evaluation. Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights.
- Anderson, J. (1975). Public Policy Making. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Asdak, C. (2014). Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bappenas, & BNPB. (2011). RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCABENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011-2013. Jakarta: BNPB.
- BAPPENAS, D.I. Yogyakarta, P. P., Jawa Tengah, P. P., & International, M. (2006, Juni 14). documents1.worldbank.org. Retrieved from worldbank.org: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/209611468269394159/pdf/407120INDONESIA10gya1Bahasa01PUBLIC1.pdf>
- Basuki, J. (2018). Administrasi Publik Telaah Teoritis dan Empiris. Depok: Rajawali Pers.
- Berkes, F. (2007). Understanding Uncertainty and Reducing Vulnerability: Lessons from Resilience Thinking. Natural hazards, 41, 283-295.
- BNPB. (2025). Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2024. Jakarta, Daerah Khusus Jakarta, Indonesia: BNPB.
- Dye, T. R. (1975). Understanding Public Policy. Englewood Cliff N.J.: Prentice-Hall.
- Eyestone, R. (1971). The Threads of Policy: A Study in Policy Leadership. Indianapolis: Bobbs-Merrill.
- Fischer, Frank., Miller, Gerald J., & Sidney, Mara S. (2007). Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Practice, and Methods. New York: CRC Press
- GADRRRES. (2022, August). <https://spab.kemdikbud.go.id>. Retrieved October 25, 2023, from <https://kemdikbud.go.id>: <https://spab.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/10/Final-Bahasa-CSSF.pdf>
- Gencer, E. A. (2017). <https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/assets/toolkit>. Retrieved March 23, 2023, from <https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/assets/toolkit>
- Gow, K., & Paton, D. (2008). The Phoenix of Natural Disasters: Community Resilience. New York: Nova Science Publisher, Inc.
- Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. New Jersey: Princeton University Press.
- Hermon, D. (2015). Geografi Bencana Alam. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hill, Micael James. & Hupe, Peter. (2002). Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice. London: SAGE Publication.
- Islamy, I. (2001). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jha, A. K., Miner, T. W., & Stanton-Geddes, Z. (2013). <https://documents1.worldbank.org/>. Retrieved from <https://worldbank.org>: <https://documents1.worldbank.org/curated/en>
- Kadir, A. (2020). Fenomena Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia. Medan: CV. Dharma Persada Dharmasraya.
- Kasim, A. (1994). Tantangan terhadap Pembangunan Administrasi Publik. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 8.
- Kemendikbudristek. (2020, November). <https://spab.kemdikbud.go.id>. Retrieved October 23, 2023, from <https://kemdikbud.go.id>: [https://spab.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2023/05/File\\_Final-Peta-Jalan-SPAB-Periode-2020-2024.pdf](https://spab.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2023/05/File_Final-Peta-Jalan-SPAB-Periode-2020-2024.pdf)
- Lipsky, M. (2010). Street-Level Bureaucracy 30th Anniversary Edition: Dilemmas of the individual in Public Service. Amerika Serikat: Russell Sage Foundation.
- Martono, N. (2015). Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci. Jakarta: Rajawali Pers.
- Meilano, I., Safitri, S., Virtriana, R., Retnowati, D. A., Atmaja, F. W., Tampubolon, D. R., . . . Zulfakriza. (2022). Gempa Bumi di Indonesia. Bandung: ITB Press.
- Musarandega, H., & Masocha, W. (2023). Disasters and the education system: Cyclone Idai and schooling disruption in eastern Chimanimani, Zimbabwe. Jambá - Journal of Disaster Risk

Studies, 6.

- Muttarak, R., & Pothisiri, W. (2013). The Role of Education on Disaster Preparedness: Case Study of 2012 Indian Ocean Earthquakes on Thailand's Andaman Coast. *Ecology and Society* 18(4): 51.
- Nambo, A. B., & Puluuluwa, M. R. (2005, April-Juni). Memahami tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik). *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 21, 262-285.
- Nigro, F., & Nigro, L. (1998). *Modern Public Administration*. New York: Herper and Row Publisher.
- Norris, F. H., Stevens, S. P., Pfefferbaum, B., Wyche, K., & Pfefferbaum, R. (2008). Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness. *American journal of community psychology*, 41(1-2), 127–150.
- Novita, A. A. (2020). Key Success Factors Tata Kelola Kota Tangguh Bencana. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 83-85.
- Parrott, E., Bernardino, A., Lomeli-Rodriguez, M., Burgess, R., Rahman, A., Direzkia, Y., & Joffe, H. (2024). Community Resilience after Disasters: Exploring Teacher, Caregiver and Student Conceptualisations in Indonesia. *Sustainability*.
- Parsons, W. (2011). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rundmo, T., & Nordfjærn, T. (2016). Does Risk Perception Really Exist? *Safety Science*, 231.
- Sabatier, P. A. (1985). *What Can We Learn from Implementation Research*. Berlin: De Gruyter.
- Santoso, A. (1993 ). Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar. *Jurnal Ilmu Politik*, 4-5.
- Santoso, A. (1993). Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar. *Jurnal Ilmu Politik*, 4-5.
- Simatupang, M., Sinaga, B. M., Hartoyo, S., & Harianto. (2020). Impact of Financial Inclusion, Government Expenditures in Education and Health Sectors on Human Development in Indonesia. *Journal of Economic Development, Environment and People*, 5-6.
- Subarno, A., & Dewi, A. (2022). A Systematic Review of the Shape of Disaster Education. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (p. 9). IOP Publishing Ltd.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno, Darmawan, I. B., Hidayatika, A., & Putri, M. (2019). *Mitigasi Bencana Alam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sulistiyastuti, A. P. (2012). *Implementas Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sulistiyastuti, D. R., & Purwanto, A. (2012). *Implementas Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sulistiyastuti, D., & Purwanto, A. (2012). *Implementas Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suryanto, Arrahman, M. T., Ningsih, R. D., Heniwati, W., Andrianto, M., Subiyakto, R., . . . Warsono. (2023). *PETA JALAN SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2023-2026*. Yogyakarta: Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta.
- Syaikat, Y. (2008). *PERAN ECONOMIC VALUATION DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS RISIKO BENCANA*. Seminar Nasional Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia (p. 8). Bogor: Institut Pertanian Bogor .
- Torani, S., Majd, P. M., Marouf, S. S., Sheikhi, R. A., & Dowlati, M. (2019). The importance of education on disasters and emergencies: A review article. *Journal of Education and Health Promotion*, 5.
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2019). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- United Nation, D. (2023, October 17). [sdgs.un.org](https://sdgs.un.org). Retrieved from [un.org: sdgs.un.org](https://sdgs.un.org)
- Watt, E. (2019, April 17). <https://theirworld.org/news/cyclone-idai-batters-education-children-futures-mozambique-malawi-zimbabwe/>. Retrieved from <https://theirworld.org/news/cyclone-idai-batters-education-children-futures-mozambique-malawi-zimbabwe/>
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.
- Wisner, B. (2006). *Let Our Children Teach Us! A Review of the Role of Education and Knowledge in Disaster Risk Reduction*. Bangalore: Books for Change.